

Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Mancanegara 1989: Kontribusi bagi Pembangunan Nasional

Meilinia Fathonah* dan Dhanang Respati Puguh

*Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S. H. Tembalang, Semarang - Indonesia

*Alamat korespondensi: meilinia.fth99@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i1.46597>

Diterima/ *Received*: 5 Juni 2022; Direvisi/ *Revised*: 19 Desember 2022; Disetujui/ *Accepted*: 19 Desember 2022

Abstract

This study argues the Mangkunegaran Arts Mission Visit to foreign countries in 1989 as an effort to contribute to Indonesia's national development. The mission which held in 1989, exactly a year after K.G.P.H. Djiwokusumo was inaugurated as the head of the Mangkunegaran Temple with the title K.G.P.A. Mangkunegara IX. The countries which had been visited on the tips were France, Britain and Japan which had become the member of Group of Seven (G-7) and had a large share in determining international economic policy. The decline in the country's foreign exchange in 1986 due to the devaluation of Rupiah against the dollar as well as on the declined of oil and gas prices spurred the New Order government to promote tourism as an alternative solution. The visit of the Mangkunegaran Arts Mission to foreign countries has become one of the promotional media for Indonesian tourism to attract foreign tourists. This momentum can not be separated from the great mission of Mangkunegara VIII and the pre-eminent oath of Mangkunegara IX to develop Mangkunegaran as a center of Javanese culture. Through historical methods, this study reveals the reasons and process of the implementation of Mangkunegaran Arts Mission Visit and explores the meaning of the visit for Indonesia's national development during the New Order Period. Because it moves from the momentum of an arts mission tour, this study can be used as a basis for policy making in the future.

Keywords: *Arts Mission Visit; Mangkunegaran; Existence Enforcement; Participation in National Development.*

Abstrak

Kajian ini merekonstruksi dan memaknai Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke mancanegara pada 1989 sebagai suatu upaya untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran dilaksanakan pada 1989, tepat setahun setelah K.G.P.H. Djiwokusumo diresmikan menjadi pemimpin Pura Mangkunegaran dengan gelar K.G.P.A. Mangkunegara IX. Negara-negara yang dikunjungi dalam lawatan ini adalah Prancis, Inggris dan Jepang yang termasuk dalam *Group of Seven* (G-7) yang memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan perekonomian internasional. Penurunan devisa negara pada 1986 akibat devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kemerosotan harga migas memacu pemerintah Orde Baru untuk menggalakan solusi alternatif yaitu sektor kepariwisataan. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke mancanegara ini menjadi salah satu media promosi pariwisata Indonesia untuk menarik minat para wisatawan mancanegara. Penyelenggaraan momentum ini tidak terlepas dari misi agung Mangkunegara VIII dan sumpah prasyta Mangkunegara IX untuk mengembangkan Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa. Melalui metode sejarah, kajian ini mengungkap alasan dan proses pelaksanaan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran serta menggali makna lawatan bagi pembangunan nasional Indonesia pada Masa Orde Baru. Oleh karena beranjak dari momentum lawatan misi kesenian, kajian ini dapat digunakan sebagai tumpuan dalam mengambil kebijakan penting di masa depan.

Kata kunci: Lawatan Misi Kesenian; Mangkunegaran; Penegakan Eksistensi; Partisipasi Pembangunan Nasional.

Pendahuluan

Berakhirnya perseteruan dua ideologi besar yaitu komunisme di bawah eks Uni Soviet dan kapitalisme di bawah Amerika Serikat tidak

mengakhiri perebutan kekuasaan di antara bangsa-bangsa. Perseteruan antarbangsa masih tetap berlanjut dalam bentuk dan dimensi yang berbeda. Berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa telah bergeser dari ideologi menjadi

pragmatisme dan ekonomisme global (Arfani 1999, 2). Guna mendapatkan kedaulatan negara, maka setiap negara harus membangun basis *hard power* dan *soft power*. Apabila *hard power* tercipta dari kemampuan sebuah negara dalam mengembangkan sektor politik, ekonomi, sosial, dan militer, maka *soft power* dapat ditempuh melalui sistem yang lebih menjamin hubungan ketertarikan dan pengakuan yang berdampak pada hubungan yang lebih awet dan langgeng yaitu sektor kebudayaan (Hoang Ha, 2016). Laju percepatan pembangunan teknologi dan derasnya arus globalisasi semakin membawa konsekuensi-konsekuensi yang nyata terhadap perubahan nilai dan gaya hidup suatu masyarakat, sehingga dalam nuansa politik internasional isu-isu yang muncul pun semakin kompleks dan salah satunya membahas mengenai masalah sosio-kultural. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya sektor kebudayaan harus ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan sektor-sektor lainnya untuk menjaga reputasi sebuah negara di mata internasional. Pembangunan basis *soft power* melalui sektor kebudayaan dapat direalisasikan dengan menggunakan *platform* diplomasi kebudayaan.

Mangkunegaran sebagai salah satu bekas swapraja warisan Kerajaan Mataram mempunyai kebudayaan yang disebut dengan seni istana sebagai produk budaya yang diadopsi dari sistem keraton. Seni yang berasal dari istana ini menjadi milik raja dan dikenal sebagai seni yang memiliki nilai estetika yang baik dan tinggi (Haryono 2009, 264). Pada mulanya seni pertunjukan ini hanya terbatas disaksikan oleh kaum bangsawan dan kaum priyayi. Namun demikian, Mangkunegaran telah membuka lebar hubungan kaum bangsawan dengan orang-orang Barat pada masa kolonial, sehingga penetrasi peradaban Barat mampu dengan cepat merembes dalam tata kehidupan Pura Mangkunegaran. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan yang dikembangkan di Pura Mangkunegaran diwarnai dengan konstruksi modern, namun tidak keluar dari aspek-aspek keasliannya. Berbagai warisan budaya Mangkunegaran mampu berkembang dan bertahan, baik arsitektur, artefak maupun seni pertunjukan yang telah mendapat pengaruh dari peradaban Barat yang sudah modern.

Sampai pada akhirnya, pada awal kemerdekaan Indonesia, di Surakarta terjadi gejolak revolusi yang dimotori oleh golongan dengan ideologi komunisme yang memelopori seni pertunjukan ditampilkan dengan tema-tema kerakyatan serta antifeodalisme. Akibatnya posisi seni istana yang bersifat feodalisme menjadi semakin terdesak, bahkan dimusuhi. Namun, keberadaan seni istana yang terkenal dengan nilainya yang *adiluhung* atau indah dan tinggi mutunya tidak dapat dilenyapkan begitu saja. Seni istana tetap memiliki keleluasaan untuk tampil dengan megah dalam kepentingan misi kesenian ke luar negeri (Soedarsono 2010, 91-93). Pada hakikatnya, pada masa kemerdekaan ini sangat rumit untuk menjelaskan kesenian yang orisinal dan khas Mangkunegaran. Meskipun Mangkunegaran lahir sebagai pecahan dari Kasunanan Surakarta setelah terjadinya fragmentasi politik di Kerajaan Mataram yang berkelanjutan, namun dalam pengembangan kebudayaannya Mangkunegaran tidak sepenuhnya mengikuti kecenderungan yang terjadi di Kasunanan Surakarta. Bahkan, adanya pernikahan politik antara penguasa Mangkunegaran dan seorang putri dari Kasultanan Yogyakarta telah menjadikan kebudayaan Mangkunegaran mengikuti unsur-unsur seni pertunjukan yang identik dengan gaya Yogyakarta (Soedarsono 1999, 235). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni yang berkembang di Pura Mangkunegaran pada masa kemerdekaan mendapatkan pengaruh dari gaya seni sebagaimana telah disebutkan.

Pada 1989, di bawah naungan Mangkunegara IX, rombongan Mangkunegaran yang terdiri atas para kerabat dan seniman melaksanakan sebuah misi untuk memopulerkan kebudayaan Jawa yang telah dikembangkan oleh Pura Mangkunegaran khususnya seni pertunjukan. Seni pertunjukan tersebut ditampilkan di negara-negara Eropa yaitu Prancis dan Inggris serta negara Asia Pasifik yaitu Jepang. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 ini merupakan kunjungan diplomatik Mangkunegaran mewakili Indonesia ke luar negeri. Adanya lawatan ini, tidak terlepas dari peran serta Mangkunegaran sebagai institusi warisan Mataram yang mempunyai kewajiban dalam melestarikan dan mewariskan kebudayaan

Jawa yang agung agar dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat Jawa yang terus terjaga dalam bertingkah laku dan berfilosofis; sehingga dengan adanya pertunjukan kebudayaann Jawa melalui momentum Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 dapat digunakan untuk membangun basis *soft power* dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan internasionalisasi yang semakin menghilangkan batas-batas zonasi antarnegara.

Kajian tentang Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 telah disinggung dalam sebuah buku yang ditulis oleh Prabowo dkk. yang berjudul *Sejarah Tari: Jejak Langkah Tari di Pura Mangkunegaran* (2007, 169) dan disertasi karya Dhanang Respati Puguh yang berjudul "Mengagungkan Kembali Seni Pertunjukan Tradisi Keraton: Politik Kebudayaan Jawa Surakarta, 1950an-1990an" (2015, 472-477). Namun, dua kajian tersebut belum membahas secara mendalam tentang Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989. Berbeda dari kajian yang telah dilakukan, artikel ini membahas tentang Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 dengan memfokuskan pada aspek dasar penyelenggaraan, pelaksanaan, dan maknanya bagi pembangunan nasional Republik Indonesia.

Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yaitu suatu proses mengumpulkan, menguji, dan menganalisis rekaman dan peninggalan pada masa lampau (Gottschalk 1983, 32). Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan rekonstruksi. Untuk menulis sejarah perlu dilakukan heuristik (pengumpulan sumber) yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dibagi menjadi dua bentuk yang pertama yaitu sumber tertulis berupa arsip, manuskrip maupun koran dan majalah sezaman. Sumber-sumber ini diperoleh melalui penelusuran di *Reksa Pustaka* Mangkunegaran dan Museum Pers Nasional Indonesia di Surakarta. Sementara itu, sumber primer yang kedua diperoleh melalui wawancara kepada para narasumber yang terlibat dalam Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran

1989. Guna memperkuat dan melengkapi pernyataan-pernyataan dari sumber primer, diperlukan pengumpulan sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian yang diperoleh melalui *Reksa Pustaka* Mangkunegaran, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya dan Perpustakaan Departemen Sejarah Universitas Diponegoro. Sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut kemudian dicek keasliannya melalui kritik eksternal dengan meninjau fisik sumber untuk menghindari sumber yang bersifat palsu. Kemudian, perlu untuk mengonfirmasikan kredibilitas sumber melalui kritik internal dengan meninjau substansi dari sumber tersebut secara mendalam. Melalui kritik sumber tersebut diperoleh fakta sejarah yang kredibel. Setelah fakta-fakta dipilih dan dipilah berdasar prinsip relevansi dilakukan interpretasi yang berupa analisis dan sintesis dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dengan menerapkan prinsip kronologi dan kausasi. Hasil interpretasi itu kemudian disajikan dalam sebuah tulisan sejarah yang disebut dengan historiografi.

Dasar Penyelenggaraan

Guna mempertahankan reputasinya, *pengageng* Mangkunegaran selalu melakukan upaya resistensi dalam menghadapi otoritas yang lebih besar dan silih berganti sejak berdiri di bawah naungan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sampai setelah bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak berdiri pada 1757, Mangkunegaran selalu dibayang-bayangi oleh kebesaran Kasunanan Surakarta yang memiliki luas wilayah lebih besar dan telah lebih dahulu memperoleh pamor sebagai pusat kebudayaan Jawa (Wasino 2014, 217). Saat baru berdiri, luas wilayah Mangkunegaran hanya 4.000 *cacah* (Soedarmono 2011, 42). Berkat kepriawaian pasukan militer Legiun Mangkunegaran, luas wilayahnya bertambah mencapai 5.000 *cacah*. Namun, sejak menjadi bagian dari NKRI, wilayah kekuasaan Mangkunegaran hanya mencakup seluas pura dan kekuasaan seorang *pengageng* Mangkunegaran menjadi semakin terbatas, hanya sebagai pengayom kebudayaan Jawa dan kepala trah

Mangkunegaran (Wardhana 2019, 106). Selain itu, Mangkunegaran bersama dengan pecahan Kerajaan Mataram yang lain menjadi kehilangan akses dalam otoritas politik dan pemerintahan. Salah satu jalan untuk mempertahankan kewibawaannya adalah mengembangkan diri sebagai institusi pelestarian kebudayaan Jawa.

Mangkunegaran sebagai institusi pengemban pelestarian budaya Jawa selalu berusaha secara terus menerus, bertahap, dan terarah untuk menggali, mengembanguatkan, dan memperkenalkan budaya Jawa yang luhur kepada seluruh lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam misi agung Mangkunegara VIII, bahwa warisan budaya Mangkunegaran harus disumbangkan kepada proses pembangunan nasional Indonesia serta sumpah prasya Mangkunegara IX yang pada dasarnya membentuk Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa yang berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia (Laporan Misi Kesenian Istana Mangkunegaran ke Jepang 8-20 Juli 1989, 1989). Salah satu bentuk realisasinya yaitu memperkenalkan kesenian dari Pura Mangkunegaran dalam sebuah momentum Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Mangkunegara IX, setelah satu tahun dinobatkan secara resmi menjadi *pengageng* Pura Mangkunegaran. Sebelum diangkat secara resmi menjadi *pengageng* Pura Mangkunegaran, pada 1980 di tengah-tengah masyarakat muncul isu-isu berupa wasiat berdarah yang berisi regenerasi kepemimpinan Pura Mangkunegaran setelah Mangkunegara VIII jatuh kepada Trah Rangga Panambang serta polemik yang disebabkan oleh wafatnya K.G.P.H. Raditya Prabukusumo pada 21 November 1977 selaku putra pertama Mangkunegara VIII yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Boyolali (“Monumen di Boyolali: Memperingati G.P.H. Raditya Prabukusumo”, 1982). Meskipun sempat menjadi isu yang menggemparkan, namun keberlangsungan Dinasti Mangkunegaran tetap berlangsung karena dukungan Trah Rangga Panambang yang tidak berambisi menduduki tahta sebagai pemimpin Mangkunegaran. Pihak Trah Rangga Panambang justru memberikan dukungan kepada K.G.P.H.

Djiwokusumo untuk meneruskan tahta menjadi pemimpin Mangkunegaran (“Mangkunegara VIII Wafat Muncul Wasiat Berdarah: Mangkunegaran Diramal Bubar Pewaris Gontok-gontokan”, 1987). Selain itu, wafatnya K.G.P.H. Raditya Prabukusumo bukanlah menjadi sebuah perdebatan karena sejak berdiri menjadi sebuah praja di wilayah *Vorstenlanden* sebagai hasil dari Perjanjian Salatiga, Mangkunegaran cukup demokratis dalam menentukan regenerasi tampuk kepemimpinan. Tidak hanya putra mahkota, namun seluruh kerabat Mangkunegaran mempunyai hak yang sama untuk ditunjuk sebagai *pengageng* pura dan kepala trah Mangkunegaran oleh dewan *pinisepuh* Mangkunegaran.

Sebagai *pengageng* Pura Mangkunegaran pada era modern, prioritas kekuasaan Mangkunegara IX tidak lagi berfokus pada aspek politik, namun lebih memprioritaskan pada keberlangsungan seni budaya. Bahkan, pada masa kepemimpinannya kebutuhan seni untuk konsumsi pariwisata semakin memperoleh tempat yang penting (Prabowo dkk. 2007, 159). Mangkunegara IX melakukan berbagai kebijakan yang terkait dengan bidang kebudayaan. Pada 1989 dilakukan penyederhanaan jumlah kantor; salah satu kantor yang tidak terlepas dari upaya Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa yaitu keberadaan kantor *Reksa Pustaka* yang mengelola warisan budaya Pura Mangkunegaran (Puguh 2015, 457). Sebelum dinobatkan menjadi *pengageng* Pura Mangkunegaran, pada 1988 lahir sebuah gagasan dari K.G.P.H. Djiwokusumo berupa tari *Bedhaya Pulung* yang terilhami oleh karya Mangkunegara IV yang produktif menciptakan nilai keteladanan melalui seni (Puguh 2015, 463). Sebagai pemimpin yang modern, ia berhasil menciptakan kerja sama antarseniman di luar pura dengan semakin banyak merekrut penari-penari dari institusi pendidikan formal maupun masyarakat umum (Prabowo dkk. 2007, 160). Guna melestarikan dan mengembanguatkan seni pertunjukan, Mangkunegara IX juga menyelenggarakan pergelaran seni di dalam maupun di luar Pura Mangkunegaran. Pada 2 Oktober 1988, diselenggarakan acara Temu Budaya Indonesia-Amerika di Pura Mangkunegaran (Puguh 2015, 437). Kemudian,

Mangkunegaran mengadakan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Prancis dan Inggris pada Juni 1989 dan Jepang pada Juli 1989.

Secara khusus, pelaksanaan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 juga tidak terlepas dari rentetan peristiwa serta wajah perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru. Program ini sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan devisa dari sektor nonmigas melalui kemajuan pariwisata. Program tersebut juga sejalan dengan upaya Mangkunegaran untuk memopulerkan kebudayaan Jawa, melanggengkan kebudayaan Jawa agar sampai pada generasi penerus, dan memperoleh pendapatan guna memelihara warisan budaya peninggalan leluhur di Pura Mangkunegaran yang diwujudkan dengan melaksanakan pengembangan wisata budaya (Daryono 1999, 55).

Akibat pengembangan wisata budaya tersebut, seni pertunjukan di Pura Mangkunegaran mengalami perubahan dari *art by destination* yang identik dengan kebudayaan khas Mangkunegaran dan hanya berfungsi sebagai sarana pelengkap upacara serta memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas di dalam Pura Mangkunegaran menjadi *art by metamorphosis* yang diolah sedemikian rupa menjadi konsumsi pariwisata dan berfungsi sebagai tontonan wisatawan (Jazuli 1994, 76). Menurut Soedarsono (1999, 8), seni yang identik dengan konsumsi wisatawan memiliki ciri: durasi yang tidak terlalu panjang; tiruan dari aslinya; penuh variasi; menanggalkan nilai sakral, magis dan simbolisnya; serta harga tiketnya yang bersahabat dengan kantong wisatawan. Perkembangan pariwisata yang terjadi di Indonesia dapat ditanggapi dengan bijak oleh Pura Mangkunegaran, sehingga Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 merupakan perwujudan partisipasi Mangkunegaran sebagai bekas swapraja pada masa kolonial dalam membangun kedaulatan negara Indonesia melalui diplomasi kebudayaan.

Pelaksanaan

Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran telah dilaksanakan di Prancis, Inggris, dan Jepang pada 1989 dengan sangat membanggakan. Pada mulanya, lawatan ini diinisiasi oleh negara tujuan

yang sebelumnya telah mengajukan permintaan kepada pihak Pura Mangkunegaran agar berkenan melaksanakan pergelaran seni tradisional yang selama ini dikembangkan di lingkup pura. Saat melaksanakan lawatan misi kesenian ini, pihak Mangkunegaran harus berkomunikasi dengan panitia pelaksana kegiatan di negara tujuan yang telah menyediakan berbagai tempat pertunjukan beserta jadwal pertunjukan.

Seluruh rombongan yang melaksanakan lawatan terdiri atas kerabat Mangkunegaran dan para seniman yang didatangkan dari dalam maupun dari luar Pura Mangkunegaran. Mangkunegaran merekrut peserta dari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Surakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta, dan Taman Budaya Surakarta (TBS) yang sudah mengenal dan fasih terhadap produk budaya Jawa yang dikembangkan di Pura Mangkunegaran. Dalam lawatan ini, Mangkunegaran melaksanakan kunjungan ke dua negara Eropa yaitu Prancis dan Inggris serta negara di Asia Pasifik yaitu Jepang. Kunjungan ke Prancis dilaksanakan pada 31 Mei hingga 7 Juni 1989 dan dilanjutkan kunjungan ke Inggris sampai dengan 15 Juni 1989. Selama melawat ke Eropa tersebut, rombongan Mangkunegaran dipandu oleh PT Patra Image; sehingga setiap acara dan kegiatan yang berlangsung selama di Prancis dan Inggris harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu PT Patra Image dan Pura Mangkunegaran. Segala hal yang berhubungan dengan perjalanan lawatan ini diatur oleh perusahaan jasa tersebut.

Selama di Prancis rombongan Mangkunegaran menginap di Flat Hotel Internasional. Pada 1 Juni 1989, seluruh rombongan diajak untuk berjalan-jalan di Istana Versailles yang sangat terkenal dengan keindahannya. Kemudian, pada 2 hingga 4 Juni 1989, para seniman melaksanakan pertunjukannya di Gedung *la Maison des Cultures du Monde*. *La Maison des Cultures du Monde* merupakan gedung bergengsi yang sangat selektif dalam menyeleksi pertunjukan yang akan ditampilkan, karena masyarakat Prancis terkenal dengan seleranya yang sangat tinggi. Pada hari selanjutnya, terutama 5 hingga 6 Juni, rombongan Mangkunegaran kembali melaksanakan

pertunjukan di Wisma Indonesia, Paris. Hingga pada akhirnya, pada 7 Juni 1989, rombongan bergegas untuk meninggalkan Prancis dan meneruskan lawatannya ke Inggris (Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Paris dan London 1989).

Seluruh rombongan Mangkunegaran yang melawat ke Inggris menginap di Hotel Lily. Namun, karena tarifnya yang sangat mahal, maka pada 10 Juni, para rombongan berpindah ke Wisma Caraka dan Wisma Merdeka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris juga memberikan sambutan hangat kepada pihak Mangkunegaran yang berkunjung pada 9 Juni 1989. Pada 11 Juni, para seniman yang akan menampilkan pertunjukan terbaiknya melaksanakan latihan di Universitas London. Selanjutnya, pada 12 Juni melaksanakan pertunjukan di Concert Hall. Kemudian, pada 13 Juni seluruh rombongan berrekreasi di Kota Cambridge dan melaksanakan pementasan terakhir di Inggris pada 14 Juni di Logan Hall. Pada 15 Juni 1989, seluruh rombongan meninggalkan Eropa dan pulang ke tanah air. Dalam Lawatan Misi Kesenian ke Inggris ditampilkan Upacara Adat Perkawinan Mangkunegaran, *Bedhaya Bedhah Madiun*, *Langendriyan Taman Soka*, *Gambyong Pareanom*, *Bandayuda*, dan *Langendriyan Menakjingga Lena* (Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Paris dan London 1989).

Sebulan kemudian, Mangkunegaran kembali melaksanakan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Jepang pada 8 hingga 20 Juli 1989. Kali ini, pihak Mangkunegaran tidak lagi didampingi maupun dipandu oleh perusahaan jasa PT Patra Image seperti sebelumnya. Saat ke Jepang, rombongan Mangkunegaran dipimpin langsung oleh Mangkunegara IX dan dibantu oleh perusahaan jasa PT Natrabu Indonesia. PT Patra Image tidak digunakan selama perjalanan ke Jepang, karena perusahaan jasa tersebut tidak melayani paket perjalanan ke Asia, selain itu harga sewa yang ditawarkan oleh PT Patra Image tergolong lebih mahal (Hari Mulyatno, Wawancara, 25 September 2021).

Lawatan ke Jepang ini juga dihadiri oleh seniman-seniman dari dalam maupun di luar pura seperti lawatan sebelumnya, walaupun ada beberapa personil yang digantikan. Rombongan

dari Mangkunegaran berangkat dari pura ke Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada 8 Juli 1989 dan baru tiba di Tokyo pada 9 Juli 1989 karena sempat transit terlebih dahulu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim kesenian baru melaksanakan pementasan di *Hiroshima Expo* pada 10-14 Juli 1989. Pada 15 Juli 1989, rombongan diajak berkeliling ke *Hiroshima Castle* yang merupakan tempat untuk mengenang peristiwa pemboman Kota Hiroshima tahun 1945 dan menjadi ikon perdamaian dunia. Selain menggelar pertunjukan di *Hiroshima Expo*, rombongan Mangkunegaran juga melakukan pertunjukan di *Numakuma Expo* dan *Hibya Hall*. Dalam Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Jepang dipergelarkan tari *srimpi*, *bedhaya*, *langendriyan*, *Klana Topeng*, *Gambyong* dan sendratari *Taman Soka*. *Langendriyan* menampilkan episode *Menakjingga Lena*. *Langendriyan* yang ditampilkan menerapkan konsep langendriyan yang “asli”, yaitu dengan menampilkan *tembang* yang dilantunkan oleh para penarinya (Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Jepang 1989; Rochana W. 2006, 13).

Kontribusi bagi Pembangunan Nasional

Keberhasilan Mangkunegaran dalam melaksanakan Lawatan Misi Kesenian pada 1989 memberikan makna positif bagi proses pembangunan nasional Indonesia. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 memiliki tiga kontribusi bagi pembangunan nasional, yaitu: sebagai jembatan diplomasi kebudayaan, media promosi pariwisata, dan penegakan eksistensi Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa.

Jembatan untuk Diplomasi Kebudayaan

Perebutan kekuasaan antarnegara tetap berlangsung dengan dimensi yang lebih halus, meskipun perang ideologi telah berakhir. Guna mengatasi perebutan kekuasaan, setiap negara harus membangun basis *hard power* dengan mengembangkan bidang politik, ekonomi, sosial maupun militer yang andal. Selain itu, sebuah negara juga perlu membangun basis *soft power* guna menghadapi hubungan antarnegara yang kian

kompleks. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia perlu untuk mengembangkan basis *soft power* melalui pengenalan kebudayaan ke luar negeri.

Selama melangsungkan pergelaran seni tradisional di Prancis, pihak Mangkunegaran dan pemerintah Indonesia memperoleh apresiasi yang luar biasa dari penduduk Prancis sangat terkenal dengan selera yang tinggi terhadap hasil kebudayaan. Bahkan, Gedung *la Maison des Cultures du Monde* yang menjadi tempat pementasan pertama rombongan dari Mangkunegaran di Prancis merupakan gedung yang sangat selektif menampilkan seni pertunjukan. Penerimaan seni tradisional yang dikembangkan oleh Mangkunegaran di Prancis menjadi bukti bahwa Mangkunegaran memiliki standar kebudayaan tinggi. Apalagi, seni pertunjukan istana jarang dijumpai di luar lingkup pura maupun keraton.

Di Inggris telah terdapat empat instansi yang memiliki koleksi perangkat gamelan Jawa yang terus menerus digunakan yaitu Festival Hall, Universitas York, Universitas Oxford, dan Universitas Cambridge. Kehadiran gamelan di tengah masyarakat Inggris memberikan pengaruh besar dalam berkesenian (“Tampil di *South Bank* 95%, 1987). Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 memperoleh apresiasi yang besar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris. Bahkan, pertunjukan kedua Mangkunegaran di London dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti seniman, pengusaha, intelektual, dan masyarakat Inggris pencinta seni gamelan. PT. Patra Image yang menjadi *officials* dalam mengatur jalannya kegiatan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Eropa juga memperoleh dukungan positif dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis maupun London. Keberhasilan Mangkunegaran dalam menampilkan karya terbaiknya di Prancis dan Inggris tidak lepas dari sistem pengelolaan dan kerja keras pihak PT. Patra Image (Sambutan-sambutan terhadap Keberhasilan Misi Kesenian Istana Mangkunegaran ketika Melawat ke Paris dan Inggris Tahun 1989).

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga diperoleh saat rombongan Mangkunegaran melawat ke Jepang pada Juli 1989. Kunjungan tim

Mangkunegaran ke Jepang diselenggarakan untuk memenuhi undangan Mr. Saiki selaku manajer *Hiroshima Expo* guna melaksanakan pertunjukan dalam rangka memperingati perdamaian dunia ke-44 tahun karena pada 6 Agustus 1945 terjadi pemboman di Kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang menyebabkan hancurnya kota dan menandai berakhirnya peperangan yang berlangsung sejak 1939. Penyelenggaraan lawatan ini berhasil mewakili Indonesia untuk tampil di Jepang bersama dengan dua puluh negara lainnya (“Tim Kesenian Mangkunegaran Menembus *Expo* di Jepang”, 1989).

Ketiga negara yang dijadikan tempat tujuan untuk mengadakan misi kesenian ini adalah anggota *Group of Seven* (G-7). *Group of Seven* didirikan sebagai wadah bagi negara-negara yang mempunyai kendali ekonomi yang besar. Setelah Perang Dunia II, Amerika masih bertahan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Kemajuan teknologi sejak tahun 1960-an juga memengaruhi Jerman dan Jepang muncul sebagai primadona perekonomian dunia. Inggris, Prancis, Kanada, dan Italia juga tumbuh sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lumayan pesat (Arfani 1999, 6). Citra positif Indonesia yang salah satunya dibangun oleh adanya lawatan misi kesenian ke Prancis, Inggris, dan Jepang yang mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan ekonomi internasional sangat menguntungkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Penghargaan yang tinggi dari negara-negara maju kepada Mangkunegaran yang mewakili Indonesia memberi makna positif bagi jalinan persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan lawatan misi kesenian ini atau pun negara-negara yang turut menyaksikan pertunjukan misi kesenian di Prancis, Inggris maupun Jepang pada 1989. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 dapat menjadi jembatan atau pembuka bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan dengan negara-negara sahabat Indonesia.

Media Promosi Pariwisata

Di antara berbagai jenis kekayaan budaya Indonesia, kesenian klasik atau tradisional yang berasal dari kalangan istana diperkirakan memiliki

daya tarik tersendiri untuk masyarakat di luar negeri. Saat berkunjung ke Indonesia, wisatawan mancanegara sangat mudah menemukan kesenian rakyat dibandingkan dengan kesenian yang berasal dari istana. Mangkunegaran sebagai institusi pengembangan kebudayaan Jawa perlu memopulerkan warisan budaya yang telah berkembang di dalam pura kepada masyarakat global. Adanya problematika nasional yang disebabkan oleh turunnya pendapatan negara dari sektor migas serta devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 1986 menyebabkan pemerintah mencari jalan alternatif lain untuk memperoleh pemasukan negara, salah satunya yaitu pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai sektor terintegrasi yang meliputi segala aspek. Secara ekonomi, keberadaan pariwisata dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan terarah yang dapat menguntungkan secara finansial, karena mampu menyerap sumber pajak dan devisa negara (Suastika 2017). Guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang stabil perlu upaya untuk menarik perhatian masyarakat luar negeri agar memiliki minat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan berrekreasi. Maka dari itu, pada 1989 diselenggarakan Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran ke Prancis, Inggris, dan Jepang.

Pariwisata juga memiliki makna penting untuk mengembangkan basis pendidikan di Indonesia. Mangkunegaran yang menyimpan hasil kebudayaan lama dapat menarik wisatawan maupun peneliti. Sebagai salah satu institusi pengembangan budaya Jawa, Mangkunegaran memiliki akses terbuka kepada para seniman yang tertarik dengan kesenian yang dikembangkan di Pura Mangkunegaran dan para ilmuwan yang tertarik dengan topik-topik yang terkait dengan eksistensi "keraton". Bahkan, peneliti asing sering berkunjung ke Mangkunegaran untuk melaksanakan penelitian dalam rentang waktu yang lama. Sebagai salah satu pusat penelitian budaya Jawa, Mangkunegaran harus ditempatkan bukan hanya sebagai objek melainkan harus dikembangkan sebagai subjek. Mangkunegaran sebagai subjek harus mengembangkan eksistensi sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa secara terarah dan berkelanjutan (Siswanto, 1992).

Setelah Indonesia merdeka, secara politis antara bekas kekuasaan tradisional di Surakarta dan Yogyakarta telah terjadi ketimpangan dalam sistem pemerintah Republik Indonesia. Pemangku keraton di Yogyakarta memperoleh perhatian lebih dari Pemerintah Pusat jika dibandingkan dengan pemangku keraton di Surakarta. Dengan demikian, pesona Surakarta lebih dikembangkan sebagai lembaga pusat kebudayaan Jawa yang dimanfaatkan dalam sektor pariwisata ("Masa Depan Keraton Solo & Yogya: Bertemunya Empat Raja dalam Satu Seminar, 1992). Secara sosial, berkembangnya zaman menyebabkan terjadinya perbenturan kehendak antara masyarakat dan pihak keraton. Masyarakat menginginkan tata kehidupan bekas kekuasaan tradisional masih tetap mempertahankan norma-norma dan adat istiadat yang ketat serta melaksanakan pola hidup tradisional. Namun, adanya momentum lawatan ini merupakan sebuah terobosan baru dari pihak Mangkunegaran bahwa kesenian yang dikembangkan di Pura Mangkunegaran harus diinternasionalisasikan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia modern.

Pada masa Orde Baru, pemerintah pusat juga merencanakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 2,5 hingga 3,5 juta dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V. Dukungan Mangkunegaran terhadap upaya pembangunan industri pariwisata juga tampak pada penerapan sapta pesona yang dicanangkan oleh pemerintah pusat (Pardiyana 1992, 44). Tampaknya pengembangan wisata budaya di Pura Mangkunegaran sengaja dilakukan guna mewakili penyebarluasan kebudayaan Indonesia, khususnya budaya Jawa; melestarikan kebudayaan Jawa agar dapat diwariskan kepada generasi penerus; serta menambah pendapatan pura untuk memelihara bangunan fisik maupun warisan budaya lainnya di lingkungan Pura Mangkunegaran (Daryono 1999, 55-56). Setelah Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989, pada Agustus jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Pura Mangkunegaran mencapai 2.091; suatu pencapaian paling tinggi selama 1989. Satu tahun kemudian, pada 1990 terdapat 15.479 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Pura Mangkunegaran, sehingga Mangkunegaran menjadi tempat tujuan rekreasi di Surakarta yang

banyak didatangi oleh wisatawan mancanegara mengalahkan kuantitas kunjungan ke Kasunanan Surakarta yang lebih unggul pada tahun sebelumnya (Pardiyana, 1992). Popularitas Mangkunegaran di dunia internasional yang salah satunya disebabkan oleh Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang tentunya akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan nasional.

Penegakan Eksistensi Mangkunegaran sebagai Pusat Kebudayaan Jawa

Sejak awal berdiri menjadi sebuah kadipaten, Mangkunegaran dihadapkan pada persaingan kekuasaan antara kerajaan Jawa lainnya yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Pura Pakualaman yang berdiri pada 1813 (Anggraeni 2012, 71). Sebagai pecahan dari Kerajaan Mataram, keempat kekuasaan ini saling bersaing dalam politik dan kebudayaan. Di Surakarta, terdapat dua otoritas kebudayaan Jawa yaitu Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kedua otoritas ini, menghasilkan corak seni yang berbeda. Keraton Surakarta lebih merepresentasikan keaslian dari budaya Keraton Mataram. Menurut Wasino, Kasunanan berorientasi pada konsistensi kebudayaan Jawa yang semakin rumit, sedangkan Mangkunegaran justru berfokus dalam mengelola pengaruh Barat secara lebih arif (Wasino 2014, 11). Dengan demikian, Kasunanan Surakarta lebih identik dengan sebutan sumber kebudayaan Jawa karena mempertahankan nilai-nilai tradisional dan tidak terbuka dengan corak lain dari luar keraton. Sementara itu, hasil budaya dari Mangkunegaran identik dengan sebutan pusat kebudayaan Jawa, karena lebih adaptif dengan tantangan dan problematika sistem globalisasi yang semakin menyudutkan perkembangan seni tradisi maupun seni klasik (Yosodipura, 1992). Meskipun terbuka dan tidak mengeliminasi kebudayaan Barat, namun, Mangkunegaran tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang menjadi karakter asli dari kesenian yang dikembangkan di Pura Mangkunegaran.

Dalam persaingan kekuasaan antara empat pecahan Kerajaan Mataram ini, Mangkunegaran

dipastikan kalah karena faktor kewibawaan dan luas wilayah yang lebih sempit. Setelah bergabung dengan NKRI, kekuasaan Mangkunegaran atas wilayah politik dan pemerintahan semakin terbatas. Mangkunegaran hanya memiliki kekuasaan wilayah seluas *saheyubing payung* atau seluas Pura Mangkunegaran dan hanya memiliki tugas sebagai pengayom kebudayaan Jawa. Setelah kemerdekaan Indonesia, persaingan dengan bekas-bekas Kerajaan Mataram yang lain bukan lagi masalah mengenai perebutan kekuasaan, melainkan sudah beralih menjadi perebutan pengaruh. Pecahan dari Kerajaan Mataram tersebut berlomba-lomba untuk memajukan peranannya dalam memenangkan pertarungan eksistensi dan reputasinya di tengah sistem globalisasi dan modernisasi. Apalagi, posisi Kasunanan dan Mangkunegaran semakin kehilangan kesempatan sebagai daerah istimewa pada 1950. Guna menghadapi situasi dan kondisi tersebut, Mangkunegaran mendirikan Himpunan Kerabat Mangkunegaran (HKMN) yang mewadahi potensi-potensi dari Mangkunegaran agar dapat disumbangkan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Meskipun telah kandas memperoleh status sebagai daerah istimewa, namun keberadaan Mangkunegaran dan Kasunanan masih tetap dihargai dan dihormati oleh pemerintah pusat. Mangkunegaran tetap menggenggam fungsi dan peranan sebagai lembaga sejarah, budaya, pariwisata, dan tempat penelitian ilmiah. Dengan demikian, kedudukan dan fungsi Mangkunegaran telah mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan dan politik menjadi lebih terbatas pada pusat budaya Jawa dan pendukung sektor pariwisata ("Masa Depan Keraton Solo dan Yogya: Keraton Tetap akan Jadi Pusat Budaya Jawa", 1992).

Hasrat untuk mempunyai sumbangsih dalam pembangunan nasional sejalan dengan misi agung Mangkunegara VIII dan sumpah prasyetya Mangkunegara IX. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 merupakan momentum penting untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia khususnya Mangkunegaran ke luar negeri, media promosi pariwisata, sekaligus respons terhadap tantangan modernisasi dan globalisasi. Momentum tersebut perlu ditekankan, karena penerus Kerajaan Mataram yang lain juga

semakin tanggap terhadap perkembangan zaman yang menjadikan seni pertunjukan istana untuk konsumsi umum. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 memberikan bukti, bahwa Mangkunegaran memiliki sumbangan yang besar kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan sekaligus semakin menegaskan eksistensinya sebagai pusat kebudayaan Jawa, karena mampu memadukan nilai tradisional dengan tantangan zaman. Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 dapat membuka mata masyarakat dunia bahwa Indonesia memiliki peradaban yang tinggi. Selain itu, kunjungan ke Prancis, Inggris, dan Jepang dapat menegaskan jati diri Mangkunegaran, bahwa kesenian yang ditampilkan dalam lawatan tersebut merupakan produk yang dikembangkan oleh Mangkunegaran yang tidak dapat diklaim oleh siapa pun di luar Pura Mangkunegaran.

Simpulan

Lawatan Misi Kesenian Mangkunegaran 1989 ke Prancis, Inggris, dan Jepang telah dilaksanakan dengan sukses dan membanggakan. Ketiga negara itu tergabung dalam *Group of Seven* yang memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan perekonomian dunia. Apresiasi yang tinggi dari negara-negara tujuan lawatan itu memberikan makna positif bagi hubungan kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lawatan itu juga memberikan citra baik Indonesia di tengah masyarakat internasional. Dengan demikian, lawatan itu dapat menjadi jembatan diplomasi kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara-negara yang dikunjungi. Pada prinsipnya, kebudayaan dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan hubungan yang lebih langgeng dan *soft power* dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia di samping penguatan sistem politik, ekonomi, sosial, dan militer. Lawatan itu menjadi media promosi pariwisata, karena kesenian Indonesia akan semakin populer di mancanegara dan mendorong masyarakat mancanegara untuk mengetahui dan mengunjungi Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia akan meningkatkan pendapatan negara yang akan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lawatan itu juga memiliki makna bagi penegakan eksistensi Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa. Lawatan itu dapat menumbuhkan citra positif bahwa Indonesia memiliki peradaban yang tinggi yang sekaligus menegaskan eksistensi dan jati diri Mangkunegaran sebagai pengayom kebudayaan Jawa.

Referensi

- “Laporan Misi Kesenian Istana Mangkunegaran ke Jepang 8-20 Juli 1989.” Reksa Pustaka Mangkunegaran (Arsip MN No. 1465), Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- “Masa Depan Keraton Solo & Yogya: Bertemunya Empat Raja dalam Satu Seminar.” *Suara Merdeka*, 5 Februari 1992.
- “Masa Depan Keraton Solo dan Yogya: Keraton Tetap akan Jadi Pusat Budaya Jawa.” *Suara Merdeka*, 6 Februari 1992.
- “Tampil di South Bank 95%.” *Buana Minggu*, 5 Juli 1987
- Anggraeni, Tyas Dian. 2012. “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1(1): 53-74. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/106>.
- Arfani, Riza Noer. 1999. “Kecenderungan Politik Internasional Kontemporer.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(1): 1-15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11141>.
- Daryono. 1999. “Dampak Pariwisata terhadap Tari Tradisional di Karaton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran Surakarta.” Tesis Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Haryono, Sutarno. 2009. “Implementasi Konsep Kesantunan Budaya Jawa pada Seni Pertunjukan Langendriya Mandraswara Mangkunegaran.” *Greget: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Tari*, 8(2): 264-277. <https://jurnal.isi->

- ska.ac.id/index.php/greget/article/view/297.
- Hoang Ha, Van Kim. 2016. "Peran Diplomasi Budaya dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN: Kasus Vietnam." *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1069>.
- Jazuli, Muhammad. 1994. "Manajemen Seni Pertunjukan Wisata Budaya di Istana Mangkunegaran Surakarta 1992-1993." Tesis Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Moestarie, Erta. "Tim Kesenian Mangkunegaran Menembus Expo di Jepang." *Cempaka Minggu Ini*, 13 September 1987.
- Pardiyana, Richas. 1992. "Peranan Istana Mangkunegaran sebagai Salah Satu Objek Wisata Budaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Surakarta." Tugas Akhir Jurusan Wisata, Akademi Pariwisata Nasional Jakarta.
- Prabowo, Wahyu Santosa. 2007. *Sejarah Tari: Jejak Langkah Tari di Pura Mangkunegaran*. Surakarta: ISI Surakarta.
- Puguh, Dhanang Respati. 2015. "Mengagungkan Kembali Seni Pertunjukan Tradisi Keraton: Politik Kebudayaan Jawa Surakarta, 1950an-1990an." Disertasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Sentana, Trim. "Mangkunegara VIII Wafat Muncul Wasiat Berdarah: Mangkunegaran Diramal Bubar Pewaris Gontok-gontokan." *Sentana*, Minggu ke-II September 1987.
- Siswanto. "Keraton di Mata Masyarakat Modern." *Suara Merdeka*, 7 Februari 1992.
- Soedarmono. 2011. *Tata Pemerintahan Mangkunegaran*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soedarsono. 1999. *Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*. Yogyakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia bekerjasama dengan arti.line.
- Soedarsono. 2010. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suastika, I Gede Yoga, et al. 2017. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(7), 1332-1363. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/29349>.
- Tanto. "Monumen di Boyolali: Memperingati G.P.H. Raditya Prabukusumo." *Bawana Minggu*, 7 Maret 1982.
- Wardhana, Adi Putra Surya, et al. 2019. "Revivalisme Kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII di Era Republik." *MUDRA: Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 105-115. <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/568>.
- Wasino. 2014. *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944*. Jakarta: Kompas.
- Yosodipuro. 1992. "Dinamika Keraton Jawa dalam Usaha Dinamika Bahasa Jawa Modern." Laporan Hasil Seminar Kebudayaan Posisi Keraton di Tengah Perubahan Zaman.